

Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Usman

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo ditinjau dari rasio kemandirian,efektivitas dan pertumbuhan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah menuju kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo masih sangat rendah dengan rasio di bawah 100 % , sehingga dana pemerintah pusat masih dominan dalam pembiayaan pemerintahan, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo selama tahun analisis (2007-2010) tidak baik dan berada di bawah rasio standar yakni 100 % dan dilihat dari rasio eektivitas menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah telah efektif karena rasio yang diperoleh di atas 100 % . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang merupakan sala satu penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan dari suatu unit sosial secara lebih mendalam dan objek dalam penelitian ini adalah perkembangan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo selama tahun 2007-2010.

Kata Kunci; *Kinerja, Pemda, Kabupaten Gorontalo*

Pendahuluan

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja disini menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan , serta rasio efektivitas . Dari uraian tersebut nampak bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Dalam proses menuju kemandirian tersebut, terutama dari segi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih dirasakan kurang. Hal ini tercermin dari data keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi belanja daerah dari tahun ke tahun.

Adapun pendapatan daerah selama tahun 2007 sebesar Rp. 463.016.786.589, ini bersumber dari dana alokasi pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun terjadi penurunan pada tahun 2008 yakni sebesar Rp. 461.037.467.347 atau terjadi penurunan sebesar 0.04 % , tetapi kondisi ini tidak berpengaruh terhadap capaian

pendapatan daerah pada tahun berikutnya. Pendapatan daerah pada tahun 2009 mencapai Rp. 516.777.927.138 atau terjadi kenaikan sebesar 14 % dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut berpengaruh terhadap capaian pendapatan daerah tahun berikutnya yakni tahun 2010 mencapai Rp. 556.322.837.134 atau terjadi peningkatan sebesar 7.42 % .

Uraian di atas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi belanja daerah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, yang dipengaruhi oleh besaran dana alokasi dari pemerintah pusat serta besaran dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan menurut Baswir (2000:7) adalah Akuntansi pemerintahan (termasuk alamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya) adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Lebih lanjut Bastian (2001:6) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUM, LSM, dan Yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor Publik dan swasta.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang di gunakan dalam suatu organisasi pemerintahan/lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai bagian yang utuh.

Dalam pembahasan sistem ini, Gede (2000:86-87) dalam bukunya “Akuntansi pemerintah” mengemukakan bahwa sistem akuntansi pemerintah terdiri dari dua sistem utama yang mempunyai hubungan data informasi akuntansi timbal balik yaitu sebagai berikut: (1) Sistem akuntansi pusat yang diselenggarakan oleh departemen keuangan terbagi atas tiga sistem yaitu: (1) Akuntansi Umum, (2) Akuntansi kas Umum negara, (3) Akuntansi bagian anggaran XVI (pembiayaan dan perhitungan).

Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Ardi Hamzah, 2008). Indikator kinerja yang dipergunakan di dalam mengukur kinerja organisasi, yaitu : a) masukan (*input*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu,

teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan; b) keluaran (*output*), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang/jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan; c) hasil (*outcome*), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dihasilkan; d) manfaat (*benefit*), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah; e) dampak (*impact*), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat (Fadillah dan Muhtar, 2004: 32).

Indra Bastian (2001 : 329) menyatakan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja keuangan merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggung jawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya, yang pemungutannya berdasarkan peraturan undang-undang (Yani ; 2002). Menurut Halim (2004:67), "Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri ; (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Sedangkan menurut (Mahmudi ; 2010) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi ; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan bebas dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan utama atau dominan, sementara subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya tidak dominan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak

Pajak adalah pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah yang merupakan penarikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Dengan demikian pajak tersebut harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum dan adanya jaminan kejujuran dan integritas petugas yang ditunjuk oleh pemerintah serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan. Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Yani Ahmad ; 52)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Daerah

Menurut Davey (1988) mengatakan bahwa retribusi adalah merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintahan regional retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utamadari pendapatan badan-badan pembangunan daerah. Sedangkan Reksohadiprodjo (1998) retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang diterima langsung dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya adanya uang langganan air minum, uang langganan listrik dan lain-lain.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang dan fasilitas atau kemamfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah adalah : (1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah, (2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah, (3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya, (4) retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan, serta (5) sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Laba BUMD

Laba BUMD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup ; (1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah , (2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ badan usaha milik daerah, (3) bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lain-Lain PAD Yang Sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Pendapatan asli daerah dari sektor ini berupa; hasil penjualan aset daerah ; jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, komisi, potongan, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan serta pendapatan denda pajak dan denda retribusi.

Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan terhadap PAD Pemerintah Daerah.

Efektifitas pemberlakuan otonomi daerah yang mulai efektif diberlakukan sejak januari 2001 (Perda no.11 tahun 2003) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah maka perlu diketahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah masing-masing kabupaten dan Kabupaten. Adapun rasio yang digunakan dalam penelitian terhadap perkembangan kinerja keuangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

$$1. \text{ Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pem.pusat/Propinsi dan Pinjaman}} \times 100 \%$$

$$2. \text{ Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*), Halim (2007 :128) rasio pertumbuhan dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

Adapun rasio yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{RpXn}-\text{Xn-1}}{\text{RpXn-1}} \times 100\%$$

Pembahasan

Pemerintahan Kabupaten/kota merupakan pusat pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana alokasi dari pemerintah pusat (undang-undang nomor 34 2004). Keuangan pemerintah daerah diharapkan agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Dalam melakukan penilaian terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah sebagai ukuran kinerja keuangan dapat digunakan beberapa rasio, yakni ; rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi serta rasio pertumbuhan. Namun dalam penelitian ini rasio yang dianalisis adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas serta rasio pertumbuhan. Adapun data yang digunakan untuk menganalisis rasio-rasio dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ;

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun 2007-2010

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah		Dana/Bantuan Pemerintah (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2007	18.183.985.815	19.944.692.186	434.305.781.173
2008	24.549.029.345	21.505.594.306	435.401.955.703
2009	34.590.397.874	23.506.415.983	502.528.481.963
2010	40.535.643.620	28.168.602.000	532.336.923.598

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gorontalo 2007-2010

Dari tabel di atas menunjukkan Laporan realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo selama tahun 2007 sampai dengan 2010. Dari data tersebut dapat dianalisis melalui beberapa rasio, yakni ;

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Pemerintah daerah dalam mengetahui apakah realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada dalam tingkat kemandirian daerah pada pemerintah Kabupaten Gorontalo sudah optimal dalam arti sesuai dengan kebutuhan atau belum, maka peneliti menggunakan metode analisis ratio kemandirian. Adapun rasio kemandirian daerah Kabupaten Gorontalo selama tahun 2007-2010 dapat dianalisis sebagai berikut ;

$$\text{Tahun anggaran 2007 : } \frac{\text{Rp.19.944.692.186}}{\text{Rp. 434.305.781.173}} \times 100 \% = 5 \%$$

Rasio kemandirian daerah untuk tahun 2007 sebesar 5 % diperoleh dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total Dana / Bantuan dari Pemerintah.

$$\text{Tahun anggaran 2008 : } \frac{\text{Rp. 21.505.594.306}}{\text{Rp. 435.401.955.703}} \times 100 \% = 4,94 \%$$

Kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2008 diperoleh rasio sebesar 4,94 % dengan cara membandingkan total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah dari dana/bantuan Pemerintah pada tahun yang bersangkutan.

Rp. 23.506.415.983

Tahun anggaran 2009 : _____ X 100 % = 4,68 %

Rp. 502.528.481.963

Perbandingan antara total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi ; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah pada pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan total pendapatan pada tahun anggaran 2009 dari dana/ bantuan Pemerintah yang bersumber dari bantuan pusat, bantuan provinsi, dan sumber lain. Dari hasil perbandingan tersebut nilai rasio yang diperoleh sebesar 4,68 %.

Rp. 28.168.602.000

Tahun anggaran 2010 : _____ X 100 % = 5,29 %

Rp. 532.336.923.598

Kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2010 diperoleh rasio sebesar 5,29 % dengan cara membandingkan total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah dari dana/bantuan Pemerintah yang bersumber dari: bantuan pusat, bantuan provinsi, serta sumber lain.

Dari perhitungan di atas diperoleh persentase antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo dibandingkan dengan total dana/bantuan pemerintah, maka diperoleh data masing-masing tahun anggaran. Adapun persentase rasio kemandirian keuangan Kabupaten Gorontalo data dapat dilihat dalam tabel berikut :

Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Gorontalo
Tahun 2007-2010

Tahun	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
2007	5 %	Tidak optimal
2008	4,94 %	Tidak optimal
2009	4,68 %	Tidak optimal
2010	5,29 %	Tidak optimal

Sumber : Data Olahan 2007-2010

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas nampak bahwa pada tahun anggaran 2007 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah hanya sebesar 5 % dengan kategori tidak optimal. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta lemahnya pengelolaan pemerintah terhadap kekayaan daerah yang tidak produktif sehingga tidak dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten Gorontalo terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat/pemerintah provinsi sangat besar.

Jika dilihat persentase capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2008 sebesar 4.94 %, angka ini lebih menurun dari tahun sebelumnya yakni terjadi penurunan 0.06 % dengan kategori tidak optimal. Penyebab utama ketidak capaian tersebut adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar kewajiban serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada pada tahun 2008. Kondisi ini mengisaratkan bahwa dana alokasi yang bersumber dari pemerintah pusat/provinsi menjadi dominan dalam mengelola pemerintahan di Kabupaten Gorontalo.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak tahun 2007 sampai tahun 2009 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam melunasi kewajiban serta profesionalisme pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, serta kontribusi tersebut masih mengandalkan dana pemerintah pusat/provinsi dalam bentuk dana alokasi dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Gorontalo.

Dana alokasi dari pemerintah pusat/provinsi diharapkan setiap tahun mengalami penurunan kepada pemerintah Kabupatenmadia/kabupaten sehingga daerah tersebut akan mandiri melalui dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun, namun jika dilihat hasil capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam persentase selama tahun 2007-2010 masih sangat rendah dengan kategori tidak optimal. Persentasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 sebesar 5,29 %, terjadi kenaikan 0.61 % dari tahun sebelumnya. Kontribusi ini masih rendah dengan kategori tidak optimal, sehingga dana alokasi masih menjadi sumber utama dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Gorontalo.

Rasio Efektivitas ;

rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim ; 2007). Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan besaran hasil rasio ini adalah ;

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Tahun 2007} &= \frac{\text{Rp. 19.944.692.186}}{\text{Rp. 18.183.985.815}} \times 100\% \\ &= 109,68 \% \end{aligned}$$

Rasio efektivitas untuk tahun 2007 sebesar 109,68 % merupakan hasil total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2007.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Tahun 2008} &= \frac{\text{Rp. 21.505.594.306}}{\text{Rp. 24.549.029.345}} \times 100 \% \\ &= 87,60 \% \end{aligned}$$

Rasio efektivitas untuk tahun 2008 sebesar 87,60 % merupakan hasil dari total target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pembanding terhadap total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2008.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Tahun 2009} &= \frac{\text{Rp. 23.506.415.983}}{\text{Rp. 34.590.397.874}} \times 100 \% \\ &= 67,96 \% \end{aligned}$$

Rasio efektivitas untuk tahun 2009 sebesar 67,96 % merupakan perbandingan dari total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2009.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Tahun 2010} &= \frac{\text{Rp. 28.168.602.000}}{\text{Rp. 40.535.643.620}} \times 100 \% \\ &= 69,49 \% \end{aligned}$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2010 maka diperoleh rasio perbandingan sebesar sebesar 69,49 % .

Dari perhitungan melalui rumus rasio efektivitas, maka dapat dibuatkan tabel persentase serta kriteria capaian setiap tahun.

**Hasil Perhitungan Analisis Rasio Efektivitas
Tahun 2007-2010**

Tahun	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
2007	109,68 %	Efektif
2008	87,60 %	Tidak Efektif
2009	67,96 %	Tidak Efektif
2010	69,49 %	Tidak Efektif

Sumber : Data olahan tahun 2007-2010.

Dari tabel diatas digambarkan bahwa pada tahun 2007 persentase rasio efektivitas yang dicapai sebesar 109,68 %, artinya kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo tergolong pada kriteria efektif. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2007 lebih besar dibandingkan dengan anggaran/target yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Dan jika dilihat capaian pada tahun 2008 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, yakni mencapai 87,60 % . Ini berarti bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih rendah dari capaian/realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun yang bersangkutan sehingga kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dikategorikan tidak efektif.

Kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2009 ditinjau dari rasio efektivitas juga mengalami penurunan, yakni menjadi 67,96 % ini berarti terjadi penurunan efisiensi 19,64 % dari tahun sebelumnya dengan kategori tidak efektif. Penurunan ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo belum berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sehingga berakibat pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Jika dilihat persentase efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hasil yang diperoleh sebesar 69,49 %, namun masih dalam kategori tidak efektif. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo belum berhasil juga mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari ; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah di atas anggaran yang telah ditetapkan, sehingga kondisi tersebut sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah .

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*), Halim (2007 :128) rasio pertumbuhan dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

Adapun rasio pertumbuhan yang dicapai pemerintah Kabupaten Gorontalo selama tahun 2007-2010 dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut;

$$\begin{aligned} \text{Rasio pertumbuhan 2008} &= \frac{\text{Rp. 21.505.594.306} - \text{Rp. 19.944.692.186}}{\text{Rp. 19.944.692.186}} \times 100 \% \\ &= 7,83 \% \end{aligned}$$

Hasil ini diperoleh dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2008 dikurangi dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2007 dibagi dengan total pendapatan asli daerah tahun 2007 di kali seratus persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2007 ke tahun 2008 hanya mencapai 7.83 %.

$$\begin{aligned} \text{Rasio pertumbuhan 2009} &= \frac{\text{Rp. 23.506.415.983} - \text{Rp. 21505594306}}{\text{Rp. 21505594306}} \times 100 \% \\ &= 9,30 \% \end{aligned}$$

Rasio pertumbuhan tahun 2009 hanya mencapai 9.30 % diperoleh dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 dikurangi dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2008 dibagi dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2008 di kali seratus persen, dengan demikian terjadi pertumbuhan dari tahun sebelumnya (2008) 1.47 %.

$$\begin{aligned} \text{Rasio pertumbuhan 2010} &= \frac{\text{Rp. 28.168.602.000} - \text{Rp. 23.506.415.983}}{\text{Rp. 23.506.415.983}} \times 100 \% \\ &= 19,83 \% \end{aligned}$$

Setelah dilakukan pembagian antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 dibagi dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 diperoleh hasil sebesar 19.83 %. Ini berarti bahwa terjadi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif dari tahun sebelumnya dengan total 10.53 %

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan ini dapat dibuatkan tabel persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kategori pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 4 tahun terakhir. Adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Ukuran Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2007-2010

Tahun	Persentase Pertumbuhan (PAD)	Kriteria
2007	-	-
2008	7.83 %	Tidak Baik
2009	9.30 %	Tidak Baik
2010	19.83 %	Kurang Baik

Sumber : Data Olahan Tahun 2007-2010.

Dari data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2007 ke tahun 2008 hanya mencapai 7.83 % dengan kategori pertumbuhan yang tidak baik, artinya bahwa potensi yang ada pada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi ; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah tidak dikelola secara maksimal.

Jika dilihat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 sebesar 9.30 % , ini berarti bahwa terjadi kenaikan sebesar 1,47 % dari tahun sebelumnya namun masih pada kategori pertumbuhan yang tidak baik . Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2010 sedikit lebih baik diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin membaik sehingga terjadi kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban sebagai wajib pajak serta membayar retribusi atas penggunaan jasa-jasa fasilitas pemerintah daerah.

Namun jika dilihat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 nampak bahwa terjadi peningkatan, dan hal tersebut juga diikuti pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2010 dengan capaian 19.83 % dengan kategori kurang baik, artinya bahwa terjadi perubahan sebelum dengan kategori tidak baik. Kondisi ini diakibatkan oleh meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah pada sektor laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah milik pemerintah daerah, namun variabel pajak daerah serta retribusi menjadi sumber utama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu ; Pertama, Kemandirian keuangan Kabupaten Gorontalo selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan, namun berada pada kategori tidak optimal. Nampak bahwa kemandirian keuangan pada tahun 2007 hanya mencapai 4.30 %, dari total pendapatan daerah dan tahun 2008 hanya mencapai 4.64 %, dari total pendapatan daerah, sedangkan tahun 2009 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 5.07 % serta tahun 2010 kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan menjadi 6.08 % dari total pendapatan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo masih sangat rendah dengan rasio di bawah 100 % , sehingga dana pemerintah pusat masih dominan dalam pembiayaan pemerintahan. Kedua, Kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2007 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah efektif karena rasio yang diperoleh di atas 100 % . Ketiga, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dengan kategori tidak baik untuk tahun 2007-2009, namun rasio pertumbuhan pada tahun 2010 mengalami peningkatan yakni dengan kategori kurang baik. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun analisis (2007-2010) tidak baik dan berada di bawah rasio standar yakni 100

Daftar Pustaka

- Bastian (2006), *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Surabaya
- Baswir. 2000. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, UI Press, Jakarta
- Devas, N., Binder, B., Both, A., Davey, K., Kelly, R., 1998, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi terjemahan, UI Press, Jakarta.
- Gede Saputra, 2000. *Sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia*, Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta : Salemba Empat.
- Kaho, J.R, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Kasmir (2008), *Memahami Rasio- Rasio Keuangan Bagi Orang Awam*. Jakarta: Elex Media komputindo
- Koswara, E, 2000, “*Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*”, *CSIS XXIX* Nomor 1, Jakarta.
- Kuncoro Mohammad, 2004 “ *Unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah*” . Jakarta. Balai Pustaka
- Mahmudi (2010), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Publisier, Jakarta
- Mohammad Mahsun (2006), *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Peraturan Perundang-Undangan No.17, 2000, Pinjaman Daerah*
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 1999, “*Government of Indonesia Tax Revenues*”, *JEBI*, Vol. 14 Nomor 4, 1-3.
- Ulum, Ihyaul (2008), *Akuntansi Sektor Publik*, Umm Press, Malang
- Yani Ahmad, 2009 ” *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia* ” Edisi Revisi 4, Jakarta : Rajawali Pers.